

**RENCANA AKSI TAHUN 2021  
DINAS TENAGA KERJA KOTA BANJAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	LANGKAH AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				PELAKSANA KEGIATAN			
			I	II	III	IV					1	2	3	4				
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja	Hasil penilaian SAKIP Dinas Tenaga Kerja	72				Program Penujangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	<p>1. Membentuk Tim Penyusunan LAKIP Dinas. 2. Mengumpulkan data dan membahasnya lingkup Internal. 3. Melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan penetapan kinerja. 4. Melakukan evaluasi kinerja (bahan pengukuran dapat diperoleh setiap pelaksanaan kegiatan dapat langsung menyusun laporan kegiatan. 5. Penyusunan Narasi Lakip. 6. Penyerahan kepada atasan</p>	✓				Subbagian Perencanaan dan Keuangan				
2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	5%	7%	7%	8%	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja	20.000.000	<p>1. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan AK-1. 2. Menyiapkan SDM yang menangani pelayanan AK-1. 3. Pelaksanaan kegiatan pelayanan AK-1. 4. Pelaporan dan pertanggungjawaban hasil kegiatan</p>	✓				Seksi Penempatan Tenaga Kerja			
											✓							
											✓							
											✓							
3	Persentase Pencari Kerja Terlatih	37,34%	19,56%	19,55%	1,3%	Program Pelatihan dan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	280.002.450	<p>1. Menganalisis kebutuhan pelatihan kerja. 2. Menyebarkan informasi kegiatan pelatihan. 3. Menyiapkan calon peserta pelatihan. 4. Menyajikan materi, instruktur dan tenaga pelatihan. 5. Menyajikan sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan pelatihan. 6. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan. 7. Pelaporan dan pertanggungjawaban hasil kegiatan</p>	✓	✓	✓	✓	Seksi Penempatan Tenaga Kerja				
															✓			
															✓			

4	Meningkatnya Perindungan Pekerja	Jumlah Rekomendasi UMK yang diterbitkan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Hubungan Industrial	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah kabupaten /kota	92.950.000	1. Penyusunan rencana kegiatan dan SK pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi LKS Tripartit, 2. Pengkoordinasian dengan Badan Pekerja LKS Tripartit untuk penyajian bahan materi pembahasan rapat koordinasi LKS Tripartit, 3. Penyajian sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan, 4. Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Lembaga ketenagakerjaan, 5. Pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan	✓	✓	✓	✓	Seksi Kelembagaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1 Dokumen rekomendasi ketenagakerjaan yang dihasilkan
5		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Hubungan Industrial	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Penyelidikan Perselisihan Hubungan Industrial (HI), Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten /kota	18.550.000	1. Adanya surat aduan dari Pekerja/Pengusaha kepada Dinas Tenaga Kerja, 2. Dinas Tenaga Kerja mengkonfirmasi kepada pengadu/pelapor, 3. Melakukan mediasi oleh mediator kepada kedua belah pihak, 4. Hasil akhirnya adanya perjanjian bersama antara pekerja dan pengusaha	✓	✓	✓	✓	Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	4 Penyelesaian Kasus
		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Penyelidikan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	38.500.000	1. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, 2. Penyebarluasan undangan peserta kepada perusahaan, 3. Penyajian sarana dan prasarana Pendukung kelancaran kegiatan, 4. Penyajian narasumber dan materi kegiatan sosialisasi, 5. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi, 6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.	✓	✓	✓	✓	Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	40 Perusahaan yang hadir dalam sosialisasi Sadarkum ketenagakerjaan							


  
 Banjarmasin, Januari 2021  
 Kepala Dinas Tenaga Kerja  
 Kota Bandung  
  
**Drs. H. ASEP TATANG ISKANDAR, M.Si.**  
 NIP. 19661108 199202 1 001